

**LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN DAN PERAN SOEKARNO PADA  
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan



**Oleh**

Lutfi Nurahman

1601075007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : Lahirnya Dekrit Presiden dan Peran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin

**Nama** : Lutfi Nurahman

**NIM** : 1601075007

Setelah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, dan direvisi sesuai saran penguji

**Program Studi** : Pendidikan Sejarah

**Fakultas** : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

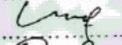
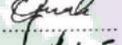
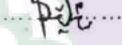
**Universitas** : Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA

**Hari** : Jumat

**Tanggal** : 28 Agustus 2020

**Tim Penguji**

	Nama Jelas
<b>Ketua</b>	: Hari Naredi, M.Pd
<b>Sekretaris</b>	: Andi, M.Pd
<b>Pembimbing</b>	: Hari Naredi, M.Pd
<b>Penguji I</b>	: Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
<b>Penguji II</b>	: Silvy Mei Pradita, M.Pd

Tanda Tangan	Tanggal
	22/09/2020
	22/09/2020
	22/09/2020
	26/10/2020
	22/09/2020

Disahkan oleh,  
Dekan

  
Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd  
NIDN. 0317126903

## ABSTRAK

**Lutfi Nurahman:** 1601075007. *“Lahirnya Dekrit Presiden Dan Peran Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin”*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya dekrit presiden pada tahun 1959, memahami bagaimana kondisi politik dan ekonomi pada saat pemerintahan demokrasi terpimpin, serta memahami peran Soekarno pada masa demokrasi terpimpin.

Metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data; (2) kritik merupakan kegiatan menyeleksi data-data yang didapatkan; (3) interpretasi merupakan kegiatan menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapatkan; (4) historiografi merupakan penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dekrit merupakan suatu bentuk keputusan presiden untuk melakukan perubahan demi menghindari akibat buruk dari kondisi dari segala aspek yang tidak stabil.. Demokrasi terpimpin merupakan sistem yang menggantikan demokrasi liberal yang dinilai tidak mampu memberikan kontribusi terhadap jalannya sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin merupakan konsep dari presiden soekarno pada saat itu menilai bahwa perlu adanya satu komando dalam suatu pemerintahan negara. Nasakom merupakan konsep yang dibentuk oleh soekarno untuk mempersatukan gerakan masyarakat Indonesia untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan negara serta melawan pihak-pihak yang ingin menguasai kembali Indonesia. Menurut Soekarno dengan mengikuti Asian Games 1962 ini posisi dan kedudukan Indonesia sebagai negara nantinya akan diperhitungkan dalam kancah Internasional

**Kata Kunci:** Dekrit, Demokrasi Terpimpin, Soekarno

## ABSTRACT

**Lutfi Nurahman:** 1601075007. "The Birth of Presidential Decree and the Role of Soekarno in the Guided Democracy Period". Essay. Jakarta: Historical Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University PROF. DR. HAMKA, 2020.

This study aims to understand what was behind the issuance of the presidential decree in 1959, understand the political and economic conditions during the guided democracy government, and understand Soekarno's role during the guided democracy era.

The research methodology used in this research is a historical research method which consists of four steps, namely: (1) Heuristics is an activity to find sources to obtain data; (2) criticism is an activity to select the data obtained; (3) interpretation is an activity to describe historical facts obtained; (4) historiography is writing history based on historical facts obtained.

The research results show that the Decree is a form of presidential decision to make changes in order to avoid the bad consequences of unstable conditions from all aspects. Guided democracy is a system that replaces liberal democracy which is considered incapable of contributing to the running of the government system. Guided Democracy is a concept of President Soekarno at that time felt that there was a need for one command in a state government. Nasakom is a concept formed by Soekarno to unite the movements of the Indonesian people to contribute to the progress of the country's development and fight against those who want to regain control of Indonesia. According to Soekarno, by participating in the 1962 Asian Games, Indonesia's position and position as a country would later be taken into account in the international arena

Keywords: Decree, Guided Democracy, Soekarno

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO .....	iv
LEMBAR PESEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Masalah .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II     KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Kajian Teori .....	11
1. Teori Demokrasi .....	11
2. Teori Tokoh.....	17
3. Teori Nasionalisme .....	20
B. Penelitian yang Relevan .....	23
BAB III    METODOLOGI PENELITIAN.....	25

A.	METODE PENELITIAN.....	25
1.	Heuristik.....	26
2.	Kritik Sumber.....	27
3.	Interpretasi .....	30
4.	Historiografi .....	31
B.	TABEL PELAKSANAAN PENELITIAN .....	32
BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS HISTORIS .....	34
A.	Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden Tahun 1959 .....	34
1.	Faktor-Faktor dikeluarkannya Dekrit Presiden.....	36
2.	Legalitas Hukum Dekrit Presiden .....	38
3.	Pengaruh Dekrit Presiden Terhadap Demokrasi Terpimpin .....	39
B.	Kondisi Politik dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin ..	42
1.	Kondisi Politik Demokrasi Terpimpin.....	44
a).	Kewenangan Presiden.....	44
b).	Manipol Usdek.....	47
c).	TNI sebagai kekuatan politik baru .....	50
2.	Kondisi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin .....	53
C.	Peran Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin .....	56
1.	Biografi Soekarno .....	57
2.	Nasakom.....	62
3.	Asian Games 1962 dan Politik Mercusuar Soekarno.....	73
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA	.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	.....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memerdekakan diri dalam gengaman penjajahan didapatkan dengan cara yang cukup sulit. Pengorbanan yang dilakukan bangsa Indonesia tidak sia-sia karena buah hasil semangat dan perjuangan Indonesia adalah kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan tersebut akan menjadi awal eksistensi Indonesia sebagai negara.

Belanda kembali ingin menguasai Indonesia pasca kemerdekaan karena melihat kondisi pemerintah Indonesia pada saat itu masih sangat tidak stabil. Keinginan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia ini ditandai dengan adanya Agresi Militer I dan II. Adanya agresi tersebut, membuat pemerintah Indonesia pada saat itu melakukan perundingan atau mengadakan konferensi dengan upaya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Perundingan atau diadakannya konferensi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan pihak belanda ini melahirkan beberapa konsensus yang harus dijalani dan disepakatin bersama. Tanggal 16 Juli 1946-25 Juli 1946 dilaksanakan Konferensi Malino yang melahirkan Negara yang pertama yaitu Negara Indonesia Timur (NIT). Hasil konferensi Malino, seperti dituangkan dalam resolusi adalah:

- 1) Menuju untuk suatu peraturan federates Indonesia, seluruh Indonesia, dengan nama : Perserikatan Negeri-negeri Indonesia.
- 2) Membagi Federasi ini dalam empat bagian: Jawa, Andalas, Kalimantan dan Timur Besar, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan Timur pada Kalimantan, Bangka, Biliton dan penggabungan pada Andalas
- 3) Mengadakan segala rapat dari konferensi kedua untuk penyelenggara dan mengerjakan usul untuk perubahan tata negara Kalimantan dan Timur Besar

1) Persetujuan dengan usul supaya tujuh wakil Indonesia dan Malino mendapat tempat untuk persiapan dari perubahan tata Negara Kalimantan, Timur Besar, Bangka, Biliton dan Riau (Budiarto, Melay, & Asril, 2017 : 5).

Konferensi yang lain yaitu, konferensi meja bundar yang di adakan di Belanda. Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasinya untuk mengadakan kesepakatan dengan Belanda mengenai beberapa hal dan masalah. Tujuan dari politik federal yang dilakukan oleh Belanda adalah untuk tetap mengendalikan Indonesia atau membatasi pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan negara-negara bagian yang direncanakan oleh Belanda sendiri (Putro, 2018 : 38). Masalah yang paling membuat bangsa Indonesia kecewa adalah perubahan terhadap konstitusi Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Karena belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat tersebut.

Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian (Santoso, 2013 : 125).

Sistem pemerintahan yang berjalan pada masa RIS tersebut yaitu sistem parlementer. Yang dimana para menteri-menteri yang sudah ditunjuk bertanggung jawab dengan jalannya pemerintahan serta berkolaborasi dengan kepala bagian yang sudah ditunjuk juga. Sedangkan posisi presiden hanya sebagai simbol saja.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut memberikan layanan kenegaraan yang istimewa serta mengakui kepentingan-kepentingan dari pihak Belanda dalam lingkup kenegaraan Indonesia dan diberikan pertimbangan sepenuhnya (Kahin, 2013 : 534). Pemerintah Indonesia pada saat itu bisa dikatakan masih belum stabil. Dengan adanya negara-negara

perserikatan yang memiliki kebijakan masing-masing serta masih adanya pengaruh dari Belanda membuat Indonesia masih belum mempunyai fondasi pemerintahan yang kuat. Pembentukan RIS ini bisa dikatakan lemahkan posisi Indonesia dan dapat memecahkan persatuan antar rakyat Indonesia.

Negara-negara bagian pada masa RIS tersebut mempunyai kebutuhan dan masalah-masalah yang berbeda. Sistem parlementer yang dijalankan pada masa RIS memang lebih cekatan dalam memwadahi persoalan yang terjadi dalam lingkup wilayah Indonesia tertentu. Tetapi pada saat itu sangat tidak relevan terhadap jati diri bangsa Indonesia sendiri.

Perjuangan rakyat dan pemerintah Indonesia dalam menegakan kedaulatan Indonesia tidak tercemrin dalam roda pemerintahan RIS. Pemerintah RIS kemudian merencanakan untuk merancang sebuah undang-undang yang bertujuan sebagai jalan agar konsep konstitsusi yang baru dapat secara legal dan resmi berlaku di Indonesia menggantikan Konstitusi RIS (Rinardi, 2012 : 190)

Konstitusi RIS sangat tidak relevan terhadap visi dan misi bangsa Indonesia pada saat itu, pemerintah Indonesia mengganti konstitusi serta UUD untuk mengubah konstitusi Indonesia dari federal menjadi kesatuan. Hal ini dirasa akan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan warga negara Indonesia pada saat itu.

Hak-hak yang harus diberikan pemerintah kepada segenap rakyat Indonesia tidak akan tersampaikan dengan adanya roda pemerintah yang bersifat federal. Karena Indonesia sendiri adalah negara yang majemuk dan warga negaranya tersebar dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Kesadaran akan hal pesatuan dan kesatuan pada saat itu dapat menyelamatkan kedaulatan bangsa Indonesia sendiri.

Para elit Indonesia pada saat itu mencari fondasi roda pemerintahan yang sesuai dengan keinginan dan jati diri bangsa Indonesia. Setelah Perang

Dunia berakhir, dunia umumnya tertarik pada demokrasi (Rais, 1986 : 45). Demokrasi merupakan sistem atau pandangan yang relevan terhadap perjuangan kemerdekaan menurut Soekarno. Soekarno beranggapan bahwa rakyat ikut turut serta dalam proses pemerintahan. Maka dari itu demokrasi adalah alat penunjang cita-cita bangsa Indonesia.

Demokrasi pertama yang menjadi pandangan bangsa Indonesia adalah Demokrasi Liberal. Menurut Roy C. Macridis, ada tiga prinsip yang dicakup oleh paham liberalisme; moral, ekonomi dan politik (Zulfikri, 2010 : 65). Jadi demokrasi liberalisme adalah suatu pandangan atau paham yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan yang dicita-citakan.

Demokrasi liberal yang berkiblat ke arah barat ini memang diharapkan dapat memenuhi hak-hak rakyat dalam berbangsa dan bernegara. Sangat sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan hadirnya demokrasi liberal dalam pemerintahan Indonesia di harapkan rakyat mendapatkan hak-haknya dan dalam pandangan berpolitik rakyat mendapatkan kebebasan yang tak terbatas.

Partai-partai nasional yang hadir begitu masif dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi rakyat Indonesia pada saat itu. Kebebasan dalam berpolitik ini tidak lepas karena sifat dari demokrasi liberal itu sendiri. Para penguasa eksekutif pada masa liberal bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan.

Paham liberalisme dalam demokrasi tentunya setiap manusia memiliki kebebasan dalam berbangsa dan bernegara. Ini di tandai dengan didirikannya banyak partai politik pada masa demokrasi liberal tersebut. Partai politik tersebut seharusnya menjadi wadah dari aspirasi rakyat namun seringkali sikap individualis dari anggota partai membuat fungsi partai politik tersebut hilang.

Waktu demokrasi liberal sampai berakhirnya UUDS 1950, terhitung terdapat 7 kabinet yang memerintah, kabinet tersebut adalah Kabinet Natsir (September 1950-maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952- Juli 1953), Kabinet Ali sastroamidjojo I (Juli 1953-1955) Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956) Kabinet Ali sastroamidjojo II (Maret 1955-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959) (Zulkarnain, 2012 :95). Ketujuh kabinet tersebut saling bergantian mengisi kedudukan dalam masa demokrasi terpimpin.

Pergantian posisi kedudukan pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Masing-masing kabinet memang merancang program dan kebijakan untuk dijalankan tetapi terkadang berhenti di tengah jalan bahkan tidak terealisasikan akibat pergantian posisi yang sangat cepat tersebut.

Menurut Hatta dalam buku demokrasi kita, dan kalau pemerintah sudah berjalan dan kemudian ada partai dalam koalisi itu yang tidak mendapat kepuasan, lalu ia menarik menteri-menternya keluar. Maka timbulah krisis kabinet (Hatta, 1966 :14). Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal tersebut mengalami perombakan dan gagal menjalankan program yang telah dirancang. Masalah tersebut sangat fatal karena negara Indonesia baru saja didirikan namun tidak mempunyai pemerintahan yang stabil. Karena sikap individualis yang terdapat dipaham liberalisme menghambat upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia pada saat itu.

Demokrasi libertarian dianggap akan berorientasi kearah tipe demokrasi elit atau delegatif (Nugroho, 2012 :6). Bahwa demokrasi liberal ini sangat berorientasi terhadap dinamika politik. Karena pada dasarnya demokrasi liberal ini memberikan kebebasan untuk masyarakat atau warga negara untuk bebas dalam berpandang politik maupun untuk mengikuti kegiatan dalam politik itu sendiri.

Demokrasi kehilatannya melegitimasi kehidupan politik modern; penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika “demokratis” pada kenyataannya tidak selalu demikian (Nasef, 2017 : 89). Nilai-nilai dari demokrasi tersebut dinodai dengan kegagalan penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Nilai demokrasi yang seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemerintahan yang baik, banyak sekali disalahgunakan dan makna dari demokrasi tersebut hilang karena pemerintah gagal memaknai demokrasi itu sendiri. Warga negara atau masyarakatlah yang menjadi korban dan memiliki efek yang signifikan dari kegagalan demokrasi tersebut

Persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal dan juga banyaknya perbedaan pendapat dalam hal pemerintahan membuat bangsa Indonesia pada saat itu kacau. Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Marwoto & Syofyan, 1959). Berikut yang menjadi keputusan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

- 1) Konstituante dibubarkan
- 2) UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia
- 3) Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

Soekarno diyakini bisa membuat yakin rakyatnya atas apa yang telah konsepkan dan mengagaskan ide dalam pikirannya dengan tujuan meningkatkan martabat bangsa Indonesia (Ricklefs, 2011 : 387). Hadirnya demokrasi terpimpin untuk menggantikan demokrasi liberal diyakini mempunyai gagasan atau nilai-nilai yang mengandung unsur nasionalisme. Soekarno sebagai presiden pada saat itu menginginkan pemerintahan Indonesia mampu mengatasi atau setidaknya meminimalisir masalah-masalah internal.

Peralihan demokrasi tersebut merupakan respon terhadap ketidak sempurnaan makna demokrasi yang menjadi alat atau roda pemerintahan. Soekarno sebagai presiden memilih untuk mengganti demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin dengan tujuan agar pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Demokrasi terpimpin yang dipilih oleh Soekarno seharusnya dijadikan sebuah contoh yang baik, karena Soekarno mampu melihat dengan jernih bahwa demokrasi liberal tidak lagi relevan. Pemilihan demokrasi terpimpin yang berpusat terhadap presiden ini lebih memudahkan penguasa atau presiden dalam mengambil atau membuat kebijakan.

Nilai dan makna nasionalisme yang terkandung dalam demokrasi terpimpin tercermin dengan adanya pembangunan proyek mercusuar. Proyek megah yang dibangun oleh pemikiran Soekarno tersebut terjadi karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Menurut pandangan Soekarno ini menjadi titik balik Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing di kancah Internasional.

Berdasarkan latar belakang dan fakta yang telah terjadi disebutkan di latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Lahirnya Dekrit Presiden dan Peran Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin Pada Tahun 1959-1965”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan, tidak serta merta permasalahan bangsa Indonesia itu sendiri telah selesai. Belanda kembali ingin menguasai Indonesia dengan cara membuat negara bagian. Pada waktu yang sama Indonesia dikejar waktu dengan membuat struktur kepemimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan. Belum lagi masalah-masalah internal yang dilakukan oleh elit politik atau partai politik pada masa demokrasi liberal yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi.

Nilai dan Implementasi demokrasi tersebut hilang karena tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan pada saat itu. Soekarno pada saat itu melihat demokrasi liberal tidak relevan dengan jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu lahirlah dekrit presiden dan Soekarno mempunyai peran sentral terhadap pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu identifikasi masalah yang dapat dikaji mengenai penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Demokrasi liberal dianggap tidak relevan dengan jati diri bangsa kemudian lahirlah dekrit presiden sebagai akhir dari masa demokrasi liberal.
2. Demokrasi terpimpin diciptakan untuk menggantikan sistem demokrasi liberal.
3. Soekarno mempunyai peran yang sentral di masa demokrasi terpimpin.

### **C. Pembatasan Masalah**

Karena adanya keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, materi, serta teori-teori, dan supaya supaya peneliti dapat dilakukan secara lebih mendalam. Dengan adanya suatu keterbatasan masalah tersebut, maka peneliti malakukan pembatasan masalah yakni hanya memilih identifikasi tertentu yang akan diteliti mengenai “Lahirnya Dekrit Presiden dan Peran Soekarno dalam Pmerintahan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1965”. Sehingga tidak semua masalah yang sudah teridentifikasi tersebut mungkin diteliti oleh penulis dengan suatu disiplin ilmu tertentu.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka dapat diambil suatu masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tahun 1959?
2. Bagaimana Kondisi Politik dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin?
3. Bagaimana Peran Soekarno Dalam Pemerintahan Demokrasi Terpimpin?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas diantaranya:

1. Memahami penyebab dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tahun 1959.
2. Memahami Kondisi Politik dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin.
3. Memahami Peran Soekarno Dalam Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Segi Praktik
  - a.) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan yang baru bagi para peneliti yang ingin membahas tentang lahirnya demokrasi terpimpin.

- b.) Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana sejarah lahirnya dekrit presiden dan peran soekarno dalam pemerintahan demokrasi terpimpin

2. Segi Teoritik

- a.) Memperkaya pengetahuan mengenai Lahirnya dekrit presiden dan peran soekarno dalam pemerintahan demokrasi terpimpin.
- b.) Memberikan informasi bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M. Z. (2016). Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia . *Jurnal Civisc*, 13(2), 209–216.
- Amalia, S. R. (2018). Hubungan Ekonomi Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Bidang Impor Hasil Pertanian Pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Avatara*, 6(2), 76.
- Amin rahayu. (2012). Pesta Olahraga Asia (Asian Games IV) Tahun 1962 Di Jakarta : Motivasi dan Capainnya. UNIVERSITAS INDONESIA. *Skripsi*
- Anam, C. (1985). Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Solo: *Jatayu Sala*.
- Budiarto, S. K., Melay, D. R., Hum, M., & Pd, M. (1950). History Of The Republic Of Indonesia States ( RIS ) T0 Return To The Unitary State Of The Republic Of Indonesia ( NKRI ) 1949-1950 Sejarah Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat ( RIS ) Sampai Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) 1949-1950. 1949–1950.
- Burke, P. (2015). Sejarah dan Teori Sosial : Edisi Kedua. Jakarta: *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Changnata, N. (2015). Konstitusionalistas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Maklumat Presiden 23 JULI 2001. *JOM*, 2.
- Dahm, B. (1987). Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: *LP3ES*.
- Dewantarina, A. (2012). Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 Di Semarang. *Journal of Indonesian History*, 1(2), 71–77.
- Djaya, T. (1983). Soekarno Hatta Ada Persamaan Dan Perbedaannya. Jakarta: *Sastra Hudaya*.
- Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah. Jakarta: *Universitas Indonesia Press*.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). Negara : Demokrasi dan Civil society. Yogyakarta:

*Graha Ilmu.*

- HAMID, H. (2012). Demokrasi ala soekarno (demokrasi terpimpin). In *SKRIPSI*.
- Hatta, M. (1966). *Demokrasi Kita*. Djakarta: *Pustaka Antara PT*.
- Himawan, I. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. *Sosiologi*, 18(1), 53–62.
- HM. Thalhah. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum*, 16, 413–422.
- HusinAffan, M., & Maksum, H. (2016). Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Aasing Di Era Globalisasi. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(4), 65–72.
- Ilmar, A. (2018). Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran Dan Praktik Politik. 4(1), 1–18.
- Kahin, G. M. T (2013) *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: *Komunitas Bambu*
- Kaligis, R. (2014). Nasionalisme dan kelas sosial : Ideologi dan praktik partai nasionalis di Indonesia Nationalism and social class : Nationalism parties ideology and practice in Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(2), 77–90.
- Kamil, H. N. (2009). *Milter Dan Kekuatan Politik : Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional era 1945-1998*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Kartodirjo, S. (1999). *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: *Kanisius*.
- Kasenda, P. (2014) *Sukarno Muda : Biografi Pemikiran 1926 - 1933*. Depok: *Komunitas Bambu*
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: *Tiara Wacana*.

- Kurniadi, A., & Ahyat, D. I. S. (2014). Indoktrinasi Manipol-USDEK sebagai Hegemoni Politik (1959-1967). *UI*.
- Kusumawardani, A., & Faturachman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, (2), 61–72.
- Kuswono. (2016). Marhaniesme : Social Ideology Create By Sukarno. *Jurnal HISTORIA*, 4(2).
- Ma'rif, S. (1985). Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: *LP3ES*.
- Marwoto, S., & Syofyan, S. (1959). Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959 *Paizon*. (1).
- Mustaqim, A. (2014). Model Penelitian Tokoh ( Dalam Teori dan Aplikasi ). 15, 201–218.
- Nadlirun. (2012). Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: *PT Balai Pustaka (Persero)*.
- Nasef, N. H. I. (2017). Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: *KENCANA*.
- Nasution, A. B. (2010). Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional. Jakarta: *PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA*.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Pemikiran Sosiologi*, 1(1).
- Pasaribu, A. (2014). Hotel Indonesia Gagasan Bung Karno, Cagar Budaya yang Dibangun dengan Dana Pampasan Perang Jepang. Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Umum*.
- Patta, A. K. (2009). Masalah dan prospek demokrasi. *Jurnal ACEDEMIA*, 1, 35–43.
- Priyadi, S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

- Purnaweni, O. H. (2004). DEMOKRASI INDONESIA : DARI MASA KE MASA. 3(2), 118–131.
- Putro, W. S. (2018). Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949; Wujud Konsensus Nasional Antara Republik Indonesia Dengan BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG. *Sejarah Citra Lekha*, 3(1).
- Rais, M. A. (1986). Demokrasi dan Proses politik. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, M. (2005) Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press
- Rinardi, H. (1950). Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada. 181–192.
- Risdiarto, D. (2018). Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Legislasi Indonesia*, 15, 59–68.
- Rosyada, D., & Dkk. (2000). Demokrasi : Hak Asasi Dan Masyarakat Madani. Jakarta: *Prenada Media*.
- Sagimun. (1986). Perlawanan dan Pengasingan Perjuang Nasional. Jakarta: *Idayu*.
- Sanit, A. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*, 1(1).
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. 2(3).
- Setyahadi, M. M. (2018). Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). *Renaissance*, 3(1), 350.
- Siregar, I. F. (2013) Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). *THAQAFIYYAT*, 14(1).
- Sjamsuddin, N. (1988). Bung Karno Kenyataan Politik dan Kenyataan Praktek. Jakarta: *CV Rajawali*.
- Soedarmo, R. (2014). Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965). *Artefak*, 2(1).

SOEKARNO, I. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: DI BAWAH BENDERA REVOLUSI.

Sugesti. (2012). *Tinjauan Historis Tentang Usaha-Usaha Pemerintah dalam Memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia Tahun 1959-1965*. Universitas Lampung.

Sukron, K. (2013). *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: KENCANA.

Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah, Metode dan Contoh Aplikasi*. Bandung: *Pustaka Setia*.

Wicaksana, A. whani. (2018). *Soekarno Sang Guru Bangsa*. Jakarta: *C-Klik Media*.

WINATA, L., & Purwaningsih, S. M. (2017). Nasakom sebagai ideologi negara tahun 1959-1965. *Pendidikan Sejarah*, 5(3).

Zulfikri, S. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: *KOMPAS*.

Zulkarnain. (2012). *Jalan Meneguhkan Negara : Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: *Punjanga Press*.